



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: <b>II (Dua).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 26 Februari 2020.</b>
Pukul	: <b>19.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan Program dan Anggaran TA 2020 (perubahan dan pergeseran) 2. Penandatanganan APBN TA 2020 di Kemenparekraf/Baparekraf RI Pasca terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kemenparekraf RI dan Perpres Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Baparekraf RI.
Hadir Komisi X DPR RI	: 46 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <b>Wishnutama Kusubandio (Menparekraf/Kepala Baparekraf RI) beserta jajarannya.</b>

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.49 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menyepakati Pagu Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 pasca terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kemenparekraf dan Perpres Nomor 97 Tahun 2019 tentang Baparekraf sebesar **Rp5.366.861.663.000,-** (*lima triliun tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT UTAMA	ANGGARAN
1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	724.669.023.000
2	Deputi Bidang Kebijakan Strategis	206.063.000.000
3	Deputi Bidang Sumber daya dan Kelembagaan	399.615.300.000
4	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	290.350.000.000
5	Deputi Bidang Industri dan Investasi	214.295.000.000
6	Deputi Bidang Pemasaran	863.802.082.000
7	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan ( <i>Events</i> )	849.282.567.000
8	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	155.882.900.000
9	UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	1.122.450.214.000
10	Badan Pelaksana Otorita	540.451.577.000
	<b>TOTAL</b>	<b>5.366.861.663.000</b>

### **Catatan:**

- a. Untuk alokasi yang sudah direalisasikan/dicairkan tetap akan menggunakan program lama yaitu Program Pengembangan Kepariwisata dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- b. Terdapat alokasi anggaran sebesar 100 Miliar yang rencana dialokasikan untuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) masih diblokir, sesuai keputusan rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemenpar RI tanggal 16 September 2019.

Dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Alokasi	%
1	Belanja Pegawai	353.004.109.000	6,58 %
2	Belanja Barang	4.022.002.283.000	74,94 %
3	Belanja Modal	991.855.271.000	18,48 %
	<b>Total</b>	<b>5.366.861.663.000</b>	<b>100%</b>

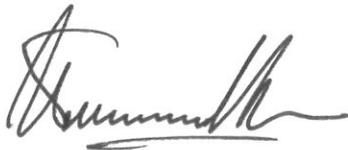
2. Terhadap pagu anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI sebagaimana angka 1 di atas, Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan:
  - a. Mengapresiasi Kemenparekraf/Baparekraf RI atas penyempurnaan perubahan/pergeseran program dan anggaran pasca terbitnya Perpres No. 96 Tahun 2019 Tentang Kemenparekraf dan Perpres No. 97 Tahun 2019 tentang Baparekraf RI, dengan tetap dilakukan pengawasan agar program dan anggaran tepat sasaran.
  - b. Mengapresiasi strategi pemerintah dalam menghadapi dampak virus Corona di sektor pariwisata, dalam bentuk strategi optimalisasi kapasitas *inbound* melalui insentif tunai (*cash insentives*), yang meliputi:

- 1) Insentif tunai kepada maskapai penerbangan dan biro perjalanan (*Cash insentives airlines dan Wholesaler*).
  - 2) Diskon harga tiket penerbangan dalam negeri.
  - 3) Diskon tarif jasa penerbangan.
  - 4) Subsidi pajak hotel dan restoran.
  - 5) Mendorong pergerakan wisata Nusantara dan MICE.
- c. Memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif di dalam negeri untuk meningkatkan perjalanan wisatawan Nusantara.
  - d. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan orkestrasi dukungan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di destinasi pariwisata prioritas dan superprioritas.
  - e. Perlunya Kemenparekraf/Baparekraf RI membentuk *Big Data* bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - f. Mendorong untuk membentuk regulasi perlindungan terhadap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta regulasi yang mendukung perawatan fasilitas pokok di destinasi pariwisata.
  - g. Melibatkan secara aktif komunitas dan jejaringnya, termasuk generasi milenial dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
  - h. Mendorong penciptaan produk audio visual ekonomi kreatif yang memiliki muatan pesan-pesan edukatif.
  - i. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menyusun peraturan turunan atas UU No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
  - j. Mendorong dilakukannya sinkronisasi dan sinergitas lembaga pengelola destinasi pariwisata prioritas dan superprioritas agar lebih efektif.
  - k. Komisi X DPR RI akan mendukung peningkatan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada pembahasan APBN tahun mendatang dengan mempertimbangkan urgensi pengembangan destinasi pariwisata potensial di daerah dan pengembangan ekonomi kreatif.

### III. PENUTUP

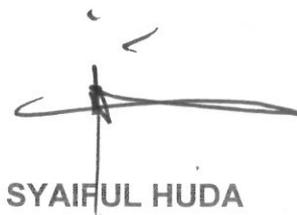
Rapat ditutup pada pukul 23.59 WIB

**MENPAREKRAF/  
BAPAREKRAF RI,**



**WISHNUTAMA KUSUBANDIO**

**KETUA,**



**SYAIFUL HUDA**

**PERSETUJUAN RKA-K/L**  
**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

(dalam ribu rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN 2020
<b>040 KEMENTERIAN PARIWISATA</b>			<b>5,366,861,663</b>
<b>040.01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN</b>			<b>5,366,861,663</b>
<b>08 PARIWISATA</b>			<b>4,244,411,449</b>
	040.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	724,669,023
		Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	724,669,023
	040.01.xx	Program Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	2,979,290,849
		Deputi Bidang Kebijakan Strategis	206,063,000
		Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan	399,615,300
		Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	290,350,000
		Deputi Bidang Industri dan Investasi	214,295,000
		Deputi Bidang Pemasaran	863,802,082
		Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)	849,282,567
		Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	155,882,900
		Badan Pelaksana Otorita	540,451,577
<b>10 PENDIDIKAN</b>			<b>1,122,450,214</b>
	040.01.xx	Program Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1,122,450,214
		UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	1,122,450,214

**Catatan:**

1. Untuk alokasi yang sudah direalisasikan/dicairkan tetap akan menggunakan program lama yaitu Program Pengembangan kepariwisataan dan Program pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Anggaran sebesar Rp 100 Miliar untuk Badan Otorita Pariwisata Danau Toba masih diblokir karena belum mendapat persetujuan Komisi X DPR RI.

Menyetujui,

Pimpinan Komisi X DPR-RI



H. Syaiful Huda

Agustina Wilujeng P, SS

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudin, MPP

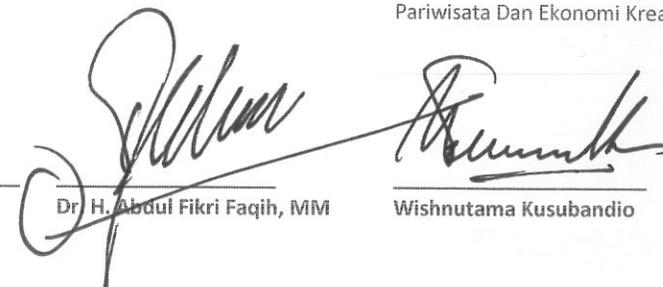
Dede Yusuf M E, ST, M.I.Pol

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM

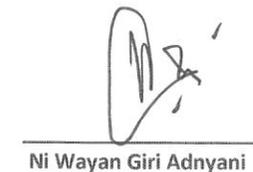
Wishnutama Kusubandio

Jakarta, 26 Februari 2020

Menteri Pariwisata Dan  
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan  
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



Sekretaris Kementerian/  
Sekretaris Utama



Ni Wayan Giri Adnyani